KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dana Aspirasi, Parlemen Melunak
Tanggal : Rabu, 08 Juli 2015
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A5

Dana Aspirasi, Parlemen Melunak

[JAKARTA] Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengatakan, tak akan mendesak pemerintah soal Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), atau yang lebih dikenal dengan dana aspirasi.

Menurut Taufik, DPR memberi keleluasaan apakah program usulan akan diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah atau tidak. "Kami tidak akan membebani atau berseberangan dengan pemerintah," kata Taufik, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (7/7).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, seluruh proposal UP2DP anggota Dewan telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim Mekanisme Penyampaian Hak UP2DP yang diketuai Taufik juga mulai mengecek ulang program-program yang diajukan dengan realita di lapangan. "Lalu sambil diproses diserahkan ke Sekretariat Negara," katanya.

Ia mengharapkan, pemerintah menyampaikan sikap resminya dalam pembahasan RAPBN 2016 di Badan Anggaran DPR. "Apakah program yang kami usulkan diterima seluruhnya atau tidak, maka sepenuhnya ada di pemerintah," ujar Taufik.

Ketua DPR Setya Novanto mengharapkan, pemerintah segera menyepakati untuk mengakomodasi usulan program yang sudah diinisiasi DPR. "Namun perlu diketahui bahwa usulan program tetap harus sesuai dengan mekanisme pembahasan RAPBN," kata politisi Partai Golkar ini dalam pidato rapat paripurna penutupan masa sidang DPR.

Sementara itu, walau mengaku masih berharap pemerintah mengakomodasi UP2DP, tetapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku bisa menerima sikap Pemerintahan Jokowi-JK yang menolak pelaksanannya.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) memberikan berkas pandangan pemerintah kepada Ketua Sidang yang juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kedua kiri) disaksikan Ketua DPR Setya Novanto (kiri) dan Wakil Ketua Fadli Zon dalam Sidang Paripurna Ke-37 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengemukakan, Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk berdiskusi tentang sikap partainya atas UP2DP yang kerap disebut Dana Aspirasi. Dia mengatakan, presiden sangat memahami posisi dan penjelasan PKB atas sikap mendukung UP2DP.

Diakomodasi

Sementara bagi PKB sendiri, takkan *ngotot* agar UP2DP tetap diakomodasi walau takkan memaksa.

"Kami tak *ngotot-ngotot* amat. Yang penting keputusan itu disepakati Pemerintah dan DPR. Yang jelas kita tetap mendukung UP2DP," kata Karding, Selasa (7/7).

Alasannya, masyarakat tetap membutuhkan saluran alternatif untuk menyampaikan aspirasinya. Selama ini, kata Hanif, bila melalui mekanisme formal yakni Musrebangda, dari 20 usulan ke pemerintah kabupaten/kota, bisa masuk 2 sampai 3 titik saja sudah luar biasa.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, ada beberapa hal yang baru dalam pembahasan RAPBN 2016. Hal baru itu bukan hanya menyangkut adanya UP2DP atau kerap disebut Dana Aspirasi, melainkan juga ada usulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang merupakan diskresi Presiden Jokowi.

Untuk UP2DP, kata Supit, setelah ditolak oleh Presiden dan Wapres, pihaknya hanya berharap bahwa usulan dari anggota dewan bisa sejalan dengan usulan oleh Pemda Kabupaten/Kota.

"Kalau nanti usulan yang diusulkan DPR ada diusulkan juga oleh kabupaten/kota, (usulan UP2DP) itu pasti akan terbahaskan juga," kata Supit, Selasa (7/7).

Sementara yang berbeda lainnya adalah adanya diskresi Presiden Jokowi yang ingin memberi Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebesar Rp 100 miliar di tiap kabupaten/kota. Kata Supit, sebenarnya Itu tidak termasuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Musrenbang.

[MJS/W-12]